

**ANALISIS SEBARAN DAN KEBUTUHAN GURU GEOGRAFI  
SMA DI WILAYAH KABUPATEN PESAWARAN  
TAHUN 2015**

**(Skripsi)**

**Oleh :**

**NUFAISA**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2016**

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF SENIOR HIGH SCHOOL ( SMA ) GEOGRAPHY TEACHERS DISSEMINATION AND REQUIREMENT IN PESAWARAN REGENCY 2015 YEARS ACADEMIC**

**By**

**NUFAISA**

The purpose of this research was to analyze the dissemination and requirement of geografi teachers in Pesawaran regency of Lampung Province in 2014/2015 years academic. The pressure point of this research was teacher qualification, teacher requirement and teacher dissemination in Pesawaran Regency. This study used a descriptive method. The object of this research is all over Senior High School in Pesawaran Regency amount of 18 schools and there was 27 teachers of geography study. The data was collected by means of questionnaires and documentation technique. The data analyzed was using tabulastion and percentage as main interpretation and description to make this research report.

The results of this research showing the information that the dissemination of teachers in Pesawaran Regency has been relevan because it fullfiling the provision of their S1 educational background and they has been certified, yet the teacher dissemination still not completely been distributed. Comprehensively the requirement of geography teachers on this territory is 24 persons. It can be stated that the dissemination of high school geography teachers in the Pesawaran regency of Lampung Province in 2014/2015 was uneven and not according to the number of geography teachers requirement in every senior high school.

*Key word : Dissemination, Geography, Teacher Requirement.*

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS SEBARAN DAN KEBUTUHAN GURU GEOGRAFI SMA DI WILAYAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2015**

**Oleh**

**NUFAISA**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sebaran dan kebutuhan guru geografi Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung tahun 2015. Titik tekan kajian pada kualifikasi guru, kebutuhan guru, dan sebaran guru di wilayah Kabupaten Pesawaran. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Objek penelitian seluruh Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Pesawaran yaitu berjumlah 19 sekolah dan memiliki 27 guru geografi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan tabulasi dan persentase sebagai dasar interpretasi dan deskripsi guna membuat laporan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan informasi bahwa kualifikasi guru di wilayah Kabupaten Pesawaran sudah relevan karena memenuhi ketentuan lulusan S1 Pendidikan Geografi dan telah disertifikasi, namun persebaran guru tiap kecamatan masih kurang merata. Secara keseluruhan kebutuhan guru geografi di wilayah tersebut 24 orang. Dapat dinyatakan bahwa sebaran guru geografi SMA di wilayah Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung tahun 2015 belum merata dan tidak sesuai dengan jumlah guru yang dibutuhkan.

Kata kunci: Geografi, Kebutuhan Guru, Sebaran.

**ANALISIS SEBARAN DAN KEBUTUHAN GURU GEOGRAFI SMA DI  
WILAYAH KABUPATEN PESAWARAN  
TAHUN 2015**

**Oleh**

**NUFAISA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA PENDIDIKAN**

**Pada**

**Program Studi Pendidikan Geografi  
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2016**

Judul Skripsi : **ANALISIS SEBARAN DAN KEBUTUHAN GURU  
GEOGRAFI SMA DI WILAYAH KABUPATEN  
PESAWARAN TAHUN 2015**

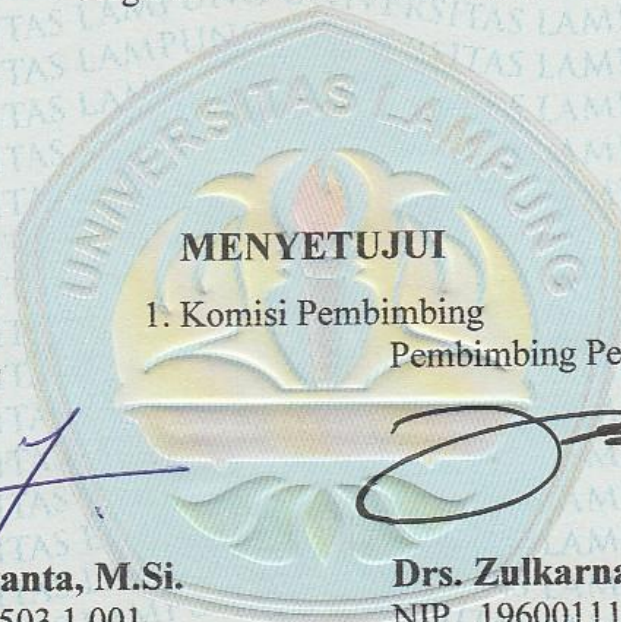
Nama Mahasiswa : **Nufaisa**

No. Pokok Mahasiswa : 1113034053

Program Studi : Pendidikan Geografi

Jurusan : Pendidikan IPS

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

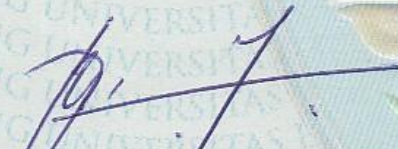


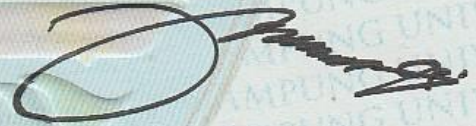
**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


  
**Drs. I Gede Sugiyanta, M.Si.**  
NIP 19570725 198503 1 001


  
**Drs. Zulkarnain, M.Si.**  
NIP 19600111 198703 1 001

**2. Mengetahui**

Ketua Jurusan Pendidikan  
Ilmu Pengetahuan Sosial

Ketua Program Studi  
Pendidikan Geografi

  
**Drs. Zulkarnain, M.Si.**  
NIP 19600111 198703 1 001

  
**Drs. I Gede Sugiyanta, M.Si.**  
NIP 19570725 198503 1 001

## MENGESAHKAN

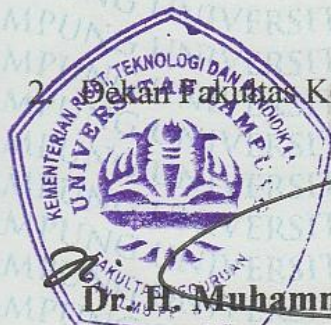
### 1. Tim Penguji

Ketua : **Drs. I Gede Sugiyanta, M.Si.** .....

Sekretaris : **Drs. Zulkarnain, M.Si.** .....

Penguji  
Bukan Pembimbing : **Drs. H. Yarmaidi, M.Si.** .....

### 2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



**Dr. H. Muhammad Fuad, M.Hum.**

NIP 19590722 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **01 Juni 2016**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, adalah :

Nama : Nufaisa  
NPM : 1113034053  
Prodi/Jurusan : Geografi/Pendidikan IPS  
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Alamat : Jln. Panglima Polim LK II No.24B Kelurahan  
Sukamenanti Kecamatan Kedaton Kabupaten Tanjung  
Karang Barat Bandar Lampung

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.



Bandar Lampung, Juni 2016

Penulis

Nufaisa

NPM 1113034053

## RIWAYAT HIDUP



Nufaisa dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 18 September 1993, merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Tanzizi, SE dan Ustiana, S.Pd.

Pendidikan Taman Kanak-kanak di TK Aisyah Bandar Lampung diselesaikan tahun 1999, Sekolah Dasar di SD AL-AZHAR II Bandar Lampung diselesaikan tahun 2005. Pendidikan lanjutan tingkat pertama di tempuh di SMP Kartika Jaya II-2 Bandar Lampung diselesaikan tahun 2008. Pendidikan menengah tingkat atas diselesaikan tahun 2011 dari Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Bandar Lampung. Pada Tahun 2011 terdaftar sebagai Mahasiswa Universitas Lampung pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Studi Pendidikan Geografi melalui jalur SNMPTN Undangan.



## **MOTTO**

**“Jangan merasa besar karna dunia mengecilkanmu, Jangan merasa kecil karna dunia tak sebesar itu tanpamu”**

**(Mahatma Gandhi)**

**“intinya bukan menjadi manusia terbaik, tapi selalu mencoba jadi manusia yang baik”**

**(NUFAISA)**

## *PERSEMBAHAN*

*Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT,  
kupersembahkan karya kecilku ini sebagai tanda baktiku  
kepada:*

*Ayah dan Ibuku tercinta yang telah membesarkanku dengan  
penuh kasih sayang dan kesabaran yang luar biasa dalam  
mendidik, membimbing, memberikan semangat, dan  
senantiasa berdoa demi keberhasilanku*

*Almamater tercinta, Universitas Lampung*

## SANWANCANA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam kepada Rasulullah SAW, yang selalu dinantikan syafa'atnya di Yaumul akhir nanti.

Skripsi dengan judul "*Analisis Sebaran dan Kebutuhan Guru Geografi SMA di Wilayah Kabupaten Pesawaran Tahun 2015*" adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Lampung.

Selama penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh saran maupun kritikan yang bersifat membangun sekaligus merupakan sebuah pembelajaran baik dalam menambah ilmu pengetahuan maupun dalam kehidupan penulis sendiri. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Drs. I Gede Sugiyanta, M.Si., selaku pembimbing I, Bapak Drs. Zulkarnain, M.Si., selaku pembimbing II, dan Bapak Drs. Hi. Yarmaidi, M.Si., selaku pembahas, serta ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hi. Muhammad Fuad, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung;

2. Bapak Dr. Abdurrahman, M. Si, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung;
3. Bapak Drs. Hi. Buchori Asyik, M.Si., selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan, Umum dan Kepegawaian Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung;
4. Bapak Drs. Supriyadi, M.Si., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung;
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Geografi, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
6. Staf Program Studi Geografi, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, terima kasih atas segala dukungan dan bantuannya terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Kedua orang tua saya tercinta terimakasih atas doa, senyum, air mata, bahagia, dukungan, kasih sayang yang telah diberikan dan semua pengorbanannya untuk saya yang tiada pernah bisa dinilai dari segi apapun; Teruntuk Suamiku Cahyo Wibowo, S. Pd dan Anakku Darius Rasyid Al Fathan yang dengan senyuman serta keridhoannya menyemangatiku hingga karya ini selesai, Aku mencintai kalian; Saudara-saudara dari Bapak dan Ibu, terima kasih atas do'a dan dukungannya;

8. Teman-teman seperjuangan saya di Prodi Geografi khususnya angkatan 2011 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas do'a, saran, dukungan serta motivasinya yang selalu kalian berikan kepada saya;
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Dalam menyusun Skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Penulis berharap Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bandar Lampung, 17 Juni 2016

Penyusun

Nufaisa

NPM. 1113034053

## DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	9
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR</b>	
2.1 Tinjauan Pustaka .....	11
2.1.1 Guru .....	11
1) Pengertian Guru .....	11
2) Persyaratan Guru .....	13
3) Beban Kerja Guru .....	15
4) Profesionalisme Guru .....	17
2.1.2 Guru Geografi .....	18
2.1.3 Kualifikasi Pendidikan Guru.....	20
2.1.4 Kompetensi Guru .....	22
1) Kompetensi Profesional.....	22
2) Kompetensi Pedagogik.....	23
3) Kompetensi Kepribadian .....	24
4) Kompetensi Sosial .....	25
2.1.5 Sertifikasi Guru .....	27
1) Manfaat Sertifikasi .....	27
2) Tujuan Sertifikasi .....	27
2.1.6 Kebutuhan Guru.....	28
2.1.7 Sebaran Guru .....	32
2.2 Kerangka Pikir .....	37
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Metode Penelitian .....	38

3.2 Populasi .....	38
3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel .....	39
3.3.1 Variabel Penelitian .....	39
3.3.2 Definisi Operasional Variabel .....	40
1) Kualifikasi Pendidikan Guru .....	40
2) Kebutuhan Guru .....	40
3) Sebaran Guru .....	41
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	41
3.4.1 Dokumentasi .....	41
3.4.2 Wawancara .....	42
3.4.3 Kuesioner .....	43
3.5 Teknik Analisis Data .....	43

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Keadaan Umum Daerah Penelitian .....	45
4.1.1 Sejarah Singkat Daerah Penelitian .....	45
4.1.2 Keadaan Geografis Daerah Penelitian .....	49
4.1.3 Letak Astronomis dan Batas Administratif Daerah Penelitian .....	56
4.1.4 Kondisi Demografis Wilayah Kabupaten Pesawaran .....	61
4.1.4.1 Persebaran dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Pesawaran .....	61
4.1.4.2 Sex Ratio .....	64
4.1.4.3 Komposisi Pendidikan Berdasarkan Agama .....	65
4.2 Penyajian Data .....	66
4.2.1 Indikator Kualifikasi Latar Belakang Pendidikan Guru Geografi SMA di Wilayah Kabupaten Pesawaran .....	66
1 Kualifikasi Pendidikan Guru yang Sesuai .....	69
2 Kualifikasi Pendidikan Guru yang Tidak Sesuai .....	71
4.2.2 Indikator Kebutuhan Guru Geografi SMA di Wilayah Kabupaten Pesawaran .....	73
4.2.3 Indikator Sebaran Guru Geografi SMA di Wilayah Kabupaten Pesawaran .....	78
4.3 Pembahasan .....	82
4.3.1 Kualifikasi dan Latar Belakang Pendidikan Guru Geografi SMA di Wilayah Kabupaten Pesawaran .....	83
4.3.2 Kebutuhan Guru Geografi SMA di Wilayah Kabupaten Pesawaran .....	84
4.3.3 Sebaran Guru Geografi SMA di Wilayah Kabupaten Pesawaran .....	86

#### **V. SIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Simpulan .....	88
5.2 Saran .....	89

#### **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Jumlah SMA dan Guru Geografi di Kabupaten Pesawaran Tahun 2015.....	6
4.1 Data curah hujan di Kabupaten pesawaran Tahun 2005-2014 .....	53
4.2 Tipe Iklim Schimidt-Ferguson .....	54
4.3 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesawaran Tahun 2014 .....	62
4.4 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesawaran Tahun 2014 .....	64
4.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama .....	65
4.6 Kualifikasi Latar Belakang Pendidikan Guru Geografi SMA di Wilayah Kabupaten Pesawaran .....	68
4.7 Analisis Kebutuhan Guru Geografi SMA di wilayah Kabupaten Pesawaran Tahun 2015 .....	75
4.8 Daftar Sebaran Guru Geografi SMA di wilayah Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Tahun 2015.....	78



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Bagan Kerangka Pikir Analisis Sebaran dan Kebutuhan Guru Geografi SMA di Wilayah Kabupaten Pesawaran .....	38
4.1 Diagram Batas Besar Nilai Dari Masing-Masing Tipe Curah Hujan Schimidt-Fergus .....	54
4.2 Peta Administrasi Kabupaten Pesawaran Tahun 2015 .....	60
4.3 Peta Sebaran Kualifikasi Latar Belakang Pendidikan Guru Geografi Di Wilayah Kabupaten Pesawaran.....	67
4.4 Peta Kebutuhan Guru Geografi SMA di wilayah Kabupaten Pesawaran.....	74
4.5 Peta Sebaran Guru Geografi SMA di Wilayah Kabupaten Pesawaran.....	79

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan manusia untuk mendapatkan sebuah hasil berupa pemikiran yang lebih bermartabat. Dengan melaksanakan suatu proses belajar, pendidikan dapat dijadikan sebagai tolak ukur kemajuan suatu negara. Pendidikan sangat dibutuhkan untuk memberikan sumbangsih dalam persaingan di era global yang semakin canggih. Dengan pendidikan juga bisa membuat pemikiran manusia lebih modern untuk mengembangkan kemampuan, pemikiran, kecerdasan, pola sikap dan tingkah laku, yang merupakan bekal untuk memajukan peradaban suatu negara.

Pendidikan mempunyai peran penting dalam membentuk generasi penerus bangsa yang cerdas dan handal dalam pelaksanaan pembangunan kehidupan bangsa. Sesuai dengan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pada pasal 3 menyatakan bahwa:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Memperhatikan isi UU Nomor 20 tahun 2003 tersebut maka dapat dipastikan bahwa kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh keberhasilan pendidikan bangsa

suatu. Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk menyiapkan manusia agar mampu mandiri, mengembangkan potensi diri, dan dapat menjadi anggota masyarakat yang berdaya guna dalam pembangunan bangsa.

Menurut Wiji Suwarno (2013: 35) dalam dunia kependidikan di Indonesia terdapat unsur-unsur penting yakni; peserta didik, pendidik, interaksi edukatif, tujuan pendidikan, materi pendidikan, alat atau media dan metode serta lingkungan pendidikan. Unsur-unsur pendidikan inilah yang kemudian akan menentukan keterlaksanaan proses pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Dalam proses pelaksanaan kependidikan di Indonesia, kita mengalami masalah-masalah penting terkait dengan pendataan beberapa elemen penting dalam dunia kependidikan.

Pendidikan dapat diperoleh melalui jalur non formal dan formal. Seperti halnya di sekolah yang merupakan jalur formal bagi peserta didik untuk mendapatkan pendidikan, melalui kegiatan belajar mengajar yang dilakukan antara guru dengan peserta didik ataupun aktivitas lainnya yang dikenal dengan istilah pembelajaran. Sedangkan untuk pendidikan non formal dapat diperoleh melalui les, kursus dan proses pembelajaran lain yang tidak terikat oleh sebuah instansi. Setiap proses pembelajaran, hal yang utama untuk menentukan proses perkembangan siswa tidak lepas oleh peran seorang guru.

Menurut E. Mulyasa (2002: 38) menjelaskan bahwa guru adalah pendidik, yang menjadi tokoh, panutan dan identifikasi, bagi peserta didik dan lingkungannya. Dan pemerintah sudah memperjelas pengertian guru dalam Undang-Undang Guru dan Dosen.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama pendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (Undang-undang Guru dan Dosen, 2005: 2).

Salah satu upaya meningkatkan mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan adalah dengan menyediakan guru yang berkualitas dan profesional. Sebab guru merupakan salah satu komponen yang mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Hampir seluruh kegiatan yang dikelola selalu berkaitan dengan tenaga guru. Kegiatan pokok sekolah tidak akan berjalan lancar bila tidak didukung oleh tenaga guru yang berkualitas.

Guru juga diharapkan tidak hanya memiliki kualifikasi akademik, namun juga harus memiliki kompetensi yang memenuhi persyaratan. Oleh karena itu untuk dapat melaksanakan pembelajaran yang baik maka guru harus memiliki kemampuan dasar mengajar yang sesuai dengan latar belakang pendidikan. Maka banyak hal yang harus diperhatikan terutama oleh instansi terkait yang mengurus penempatan guru seperti pemerintah daerah maupun dinas pendidikan, yaitu mengenai sebaran guru. Sebaran guru di sini adalah merata atau tidak meratanya sebaran guru khususnya guru geografi pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Merata dalam hal ini, bahwa kesesuaian jumlah guru terhadap jumlah siswa, jumlah kelas dan jumlah jam mata pelajaran per minggu, sehingga tidak terdapat kelebihan atau pun kekurangan jumlah guru di suatu sekolah, dan kebutuhan akan guru terpenuhi sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan

optimal. Pembelajaran yang optimal salah satunya juga ditentukan oleh guru yang professional. Maksud dari guru yang professional di sini adalah guru diharapkan memiliki kemampuan dasar mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikan. Seperti yang ditegaskan pada pasal 29 PP RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional yang berbunyi pendidik pada pendidikan dasar dan menengah masing-masing memiliki :

1. Kualifikasi akademik minimal S1 atau D4
2. Latar Belakang pendidikan tinggi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan,
3. Sertifikasi profesi guru dengan jenis dan tingkat sekolah tempat kerjanya, dan dalam melaksanakan tugas, guru memiliki kewajiban untuk melaksanakan wajib mengajar 24 (dua puluh empat) jam tatap muka.

Berdasarkan penjelasan diatas guru mata pelajaran seperti geografi haruslah memiliki relevansi dengan latar belakang pendidikannya yang seharusnya juga geografi.

Guru merupakan faktor utama dalam rangka menentukan efektif tidaknya proses belajar mengajar. Oleh karena itu dibutuhkan perencanaan yang baik tentang persebaran guru pada setiap instansi pendidikan. Lebih khusus jumlah kebutuhan guru secara umum maupun setiap bidang studi dan setiap sebaran guru secara merata per daerah, persekolah dan bidang studi tertentu. Karena dengan jumlah guru yang berkualitas dan diikuti dengan persebaran yang merata maka peningkatan mutu pendidikan dapat tercapai dengan baik.

Hal penting yang harus mendapatkan perhatian serius bagi Dinas Pendidikan diberbagai daerah, adalah dengan memperhatikan sebaran sekolah dan upaya penataan sebaran guru mengajar, untuk disesuaikan dengan kualifikasi bidang studi yang diajarkan di setiap sekolah. Dengan sebaran guru yang sesuai pada setiap daerah dapat membuat kegiatan belajar mengajar dapat terjalin dengan baik. Hal ini penting, karena pada setiap tempat pendidikan di sekolah untuk SMA khususnya di wilayah Kabupaten Pesawaran, persebaran kebutuhan guru sangat tidak mendukung untuk melakukan proses pengajaran. Dengan tidak meratanya kebutuhan guru khususnya guru mata pelajaran geografi dapat mengganggu dan menjadikan tidak optimalnya penyampaian materi pelajaran untuk siswa.

Pada tahun 2015 wilayah Kabupaten Pesawaran terdapat 19 SMA baik negeri maupun swasta, 13 SMA Negeri, dan 6 SMA Swasta. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran, berikut daftar SMA Negeri dan Swasta di Kabupaten Pesawaran:

**Tabel 1.1 Jumlah SMA dan Guru Geografi di Kabupaten Pesawaran Tahun 2015**

No	Kecamatan	Nama Sekolah	Jumlah Guru Geografi
1	Gedong Tataan	SMA Negeri 1 Gedong Tataan	2
		SMA Negeri 2 Gedong Tataan	1
		SMA Taman Siswa Gedong Tataan	1
2	Negeri Katon	SMA Negeri 1 Negeri Katon	2
		SMA Negeri 2 Negeri Katon	1
3	Way Lima	SMA Negeri 1 Way Lima	2
4	Kedondong	SMA Negeri 1 Kedondong	3
5	Kedondong	SMA Negeri 1 Way Khilau	1
6	Padang Cermin	SMA Negeri 1 Padang Cermin	2
		SMA Negeri 2 Padang Cermin	1
		SMA Dharma Asih Padang Cermin	1
		SMA PGRI Padang Cermin	1
7	Punduh Pedada	SMA Negeri 1 Punduh Pedada	2
		SMA Negeri 2 Punduh Pedada	1
		SMA Pahawang	1
8	Tegineneng	SMA Negeri 1 Tegineneng	2
		SMA Negeri 2 Tegineneng	1
		SMA Muhammadiyah Tegineneng	1
		SMA Dwi Mulya Tegineneng	1
<b>Jumlah</b>			<b>27</b>

Sumber : Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Pesawaran tahun 2015.

Dari data tabel 1.1 tersebut terlihat bahwa jumlah guru pada setiap sekolah reratanya hanya berjumlah 1 orang. Jumlah terbanyak pada setiap sekolah hanya berjumlah tidak lebih dari 2 orang. Dengan jumlah tersebut guru geografi yang ada pada setiap sekolah harus mengajar dari kelas 1 sampai kelas 3 yang apabila dicermati hal ini sangat tidak efisien untuk proses pembelajaran yang ideal.

Bertolak dari data yang sudah ada, banyak guru yang mengajar mata pelajaran geografi memiliki latar belakang pendidikan yang tidak relevan dengan mata pelajaran yang diajarkan. Banyak guru yang terpaksa mengajar pelajaran geografi dikarenakan jumlah guru geografi yang tidak merata, terutama pada sekolah-sekolah

swasta. Dengan keadaan seperti ini menyebabkan proses penyampaian materi akan sangat terganggu dikarenakan kurang menguasainya keahlian seorang guru terhadap mata pelajaran yang diajarkannya.

Dari lokasi SMA yang ada di wilayah Kabupaten Pesawaran saat ini belum dipetakan secara konvensional ataupun digital serta belum adanya basis data yang menyajikan data atau informasi di tiap-tiap SMA. Peta dapat digunakan untuk mengetahui berbagai informasi yang termuat di dalam peta tersebut, misalnya peta penyebaran guru.

Peta dapat digunakan untuk melihat bagaimana pola sebaran dari guru geografi yang ada di Kabupaten Pesawaran dan dapat dilihat bagaimana pola penyebaran guru tersebut, apakah pola penyebaran guru tersebut seragam (merata), mengelompok, dan *random* (acak). Seandainya pola penyebaran guru diketahui belum merata, maka perlu adanya peningkatan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan menengah yang terjangkau bagi semua penduduk yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, melalui pendidikan formal SMA atau bentuk pendidikan lain yang sederajat.

Hal ini merupakan tugas bagi pemerintah terkait sesuai dengan UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003, yakni:

“Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesimbangan.”



Berdasarkan permasalahan tersebut yang menjadikan dasar untuk melakukan penelitian tentang analisis sebaran dan kebutuhan guru geografi SMA. Dengan melakukan pemetaan diharapkan dapat diketahui dan dapat mengkaji pola sebaran guru SMA di wilayah Kabupaten Pesawaran, maka menjadi perhatian untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Sebaran dan Kebutuhan Guru Geografi SMA di wilayah Kabupaten Pesawaran”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah setiap guru geografi yang mengajar di SMA telah sesuai dengan kualifikasi pendidikannya di wilayah Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Tahun 2015?
2. Berapakah kebutuhan guru geografi pada setiap SMA di wilayah Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Tahun 2015?
3. Bagaimanakah sebaran guru geografi pada setiap SMA di wilayah Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Tahun 2015?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendapatkan informasi tentang kesesuaian guru geografi yang mengajar di setiap SMA di wilayah Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Tahun 2015.
2. Untuk mendapatkan informasi tentang kebutuhan guru geografi di setiap SMA di wilayah Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Tahun 2015.

3. Untuk mendapatkan informasi tentang persebaran dan jumlah guru geografi di setiap SMA di wilayah Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Tahun 2015.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Geografi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
2. Memberikan informasi tentang lokasi serta data guru di setiap SMA Negeri dan Swasta di wilayah Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Tahun 2015.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pendidikan. Selain itu dapat dijadikan sebagai referensi bagi para peneliti yang akan meneliti masalah-masalah lain yang relevan.

#### **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Adapun ruang lingkup dari penelitian ini, yaitu:

1. Ruang lingkup objek penelitian adalah sekolah SMA di wilayah Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Tahun 2015.
2. Ruang lingkup subjek penelitian adalah sebaran guru SMA di wilayah Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Tahun 2015.
3. Ruang lingkup tempat dan waktu adalah Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Tahun 2015.
4. Ruang lingkup ilmu yaitu Geografi. Menurut R.Bintarto (1983), geografi sebagai ilmu yang mempelajari hubungan kausal gejala geosfer muka bumi

dan peristiwa yang terjadi di muka bumi baik fisik maupun yang menyangkut makhluk hidup beserta permasalahannya, melalui pendekatan keruangan, ekologi dan kewilayahan.

Pada Seminar Lokakarya Geografi tahun 1988 yang diprakarsai oleh Ikatan Geografi Indonesia (IGI) sepakat merumuskan definisi geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR**

### **2.1 Tinjauan Pustaka**

#### **2.1.1 Guru**

##### **1) Pengertian Guru**

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dari pengertian tersebut, tersirat bahwa seorang guru mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional khususnya di bidang pendidikan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005: 377), yang dimaksud dengan guru adalah orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya, profesinya) mengajar. Pengertian guru menurut KBBI di atas, masih sangat umum dan belum bisa menggambarkan sosok guru yang sebenarnya, sehingga untuk memperjelas gambaran tentang seorang guru diperlukan definisi-definisi lain. Suparlan dalam bukunya yang berjudul *Menjadi Guru Efektif*, mengungkapkan hal yang berbeda tentang pengertian guru. Menurut Suparlan (2008: 12), guru dapat diartikan

sebagai orang yang tugasnya terkait dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dalam semua aspeknya, baik spiritual dan emosional, intelektual, fisik, maupun aspek lainnya. Namun, Suparlan (2008:13) juga menambahkan bahwa secara legal formal, guru adalah seseorang yang memperoleh surat keputusan (SK), baik dari pemerintah maupun pihak swasta untuk mengajar. Pengertian-pengertian mengenai guru di atas sangat mungkin untuk dapat dirangkum. Jadi, guru adalah seseorang yang telah memperoleh surat keputusan (SK) baik dari pihak swasta atau pemerintah untuk menggeluti profesi yang memerlukan keahlian khusus dalam tugas utamanya untuk mengajar dan mendidik siswa pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan menengah, yang tujuan utamanya untuk mencerdaskan bangsa dalam semua aspek. Oleh karena itu, sudah sepantasnya seorang guru memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Guru sebagai pendidik dalam lembaga pendidikan formal di sekolah secara langsung atau tegas menerima kepercayaan dari masyarakat untuk memikul jabatan dan tanggung jawab pendidikan. Maka selain harus memiliki syarat sebagai manusia dewasa harus memenuhi syarat sebagai berikut. Guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membina anak didik secara individu maupun klasikal, di sekolah maupun diluar sekolah. (Syarif Bahri Djamarah, M. Ag, 2005:32). Guru dikarakteristikan sebagai orang fasilitator yang mencoba menolong menyiapkan kondisi agar siswa dapat bebas merasakan dan mengembangkan emosional, intelektual dan motoriknya. (Abraham H. Maslow, Carl R. Roke dalam Nana Sujana, 1991 : 170).

Berdasarkan pengertian diatas, maka jelas bahwa tugas seorang guru adalah mengelola proses pembelajaran di kelas bukan hanya sebagai satu-satunya sumber belajar (*teacher*) tetapi beralih sebagai :

1. Pelatih (*Coach*) yaitu untuk mendorong siswa menguasai materi pelajaran, memotivasi siswa untuk kerja keras dan mencapai prestasi tinggi.
2. Pembimbing (*Conselor*) yaitu berperan sebagai sahabat bagi anak didiknya.
3. Manajer belajar (*manager of learning*) yaitu untuk membimbing siswa untuk mengambil prakarsa dan ide-ide baru.

Oleh karena itu, sudah sepantasnya seorang guru memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

## 2) Persyaratan Guru

Di dalam Bab IV Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, disebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional.

Terkait dengan hal di atas, terdapat beberapa persyaratan untuk menjadi guru. Adapun persyaratan menjadi guru menurut Roestiyah N. K (1994), yaitu sebagai berikut .

1. Persyaratan fisik, yaitu kesehatan jasmani, maksudnya seorang calon guru harus berbadan, tidak berpenyakit menular, dan tidak memiliki cacat tubuh yang dapat mengganggu kelancaran tugasnya mengajar di muka kelas.

2. Persyaratan psikis, yaitu tidak mengalami gangguan penyakit jiwa atau penyakit syaraf, yang tidak memungkinkan menunaikan tugasnya dengan baik, selain itu juga diharapkan memiliki bakat dan minat keguruan.
3. Persyaratan moral, yaitu sifat susila dan budi pekerti luhur, maksudnya calon guru dan pendidikan adalah mereka yang sanggup berbuat suatu kebajikan, serta bertingkah laku yang dapat dijadikan teladan bagi masyarakat.
4. Persyaratan intelektual dan akademis, yaitu yang mengenai pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari lembaga pendidikan guru yang memberikan bekal untuk memberikan tugas pendidikan formal di sekolah.
5. Persyaratan kualifikasi akademik adalah keahlian atau kecakapan khusus dalam bidang pendidikan baik sebagai pengajar pelajaran, administrasi pendidikan dan seterusnya yang diperoleh dari proses pendidikan dapat diartikan sebagai tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan.
6. Persyaratan kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
7. Persyaratan sertifikasi guru merupakan pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi profesional. Oleh karena itu, sertifikasi guru merupakan keniscayaan masa depan untuk meningkatkan kualitas dan martabat guru, menjawab arus globalisasi dan menyiasati sistem desentralisasi.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dikatakan bahwa tidak semua orang dapat menjadi seorang guru, karena selain dibutuhkan kecerdasan intelektual, seorang guru juga harus memiliki kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Selain itu, tugas seorang guru adalah menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan semakin bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya.

### **3) Beban Kerja Guru**

Menurut Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Bersama tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS Tahun 2011, penataan guru PNS merupakan upaya optimalisasi pemberdayaan guru PNS untuk memenuhi beban kerja minimal 24 jam tatap muka dan maksimal 40 jam tatap muka perminggu. Guru yang diprioritaskan untuk melaksanakan tugas minimum 24 jam tatap muka dan maksimum 40 jam tatap muka perminggu didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- 1) Guru bersertifikat pendidik.
- 2) Masa kerja tertinggi sebagai guru.
- 3) Pangkat dan golongan tertinggi.
- 4) Guru yang mengampu mata pelajaran sesuai dengan latar belakang pendidikannya.
- 5) Perolehan angka kredit tertinggi.
- 6) Tugas tambahan, dan
- 7) Prestasi kerja berdasarkan penilaian kinerja guru (yang dilakukan oleh pengawas, kepala sekolah, dan teman sejawat).

Apabila masih terdapat guru PNS yang belum memenuhi kewajiban mengajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu di satuan administrasi pangkal (satminkal), maka satuan pendidikan dimaksud dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dalam jangka panjang, jumlah jam tatap muka di satuan pendidikan dapat



ditingkatkan dengan meningkatkan daya tampung sekolah dan menata/merencanakan kembali jumlah peserta didik per rombongan belajar dengan mengacu pada Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dan Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses yang mengatur jumlah maksimal peserta didik setiap rombongan belajar.

- 2) Menata guru yang belum mengajar untuk mengajar pada sekolah lain.
- 3) Ekuivalensi kegiatan/ jam tatap muka.

Pada PP No 74 Pasal 52 ayat 1-3 yang berisi :

- (1) Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok:
  - a. merencanakan pembelajaran;
  - b. melaksanakan pembelajaran;
  - c. menilai hasil pembelajaran;
  - d. membimbing dan melatih peserta didik; dan
  - e. melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja Guru.
- (2) Beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (3) Pemenuhan beban kerja paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan paling

sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satuan pendidikan tempat tugasnya sebagai Guru Tetap.

#### **4) Profesionalisme Guru**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 pada Bab 1 Pasal 1 tentang Guru dan Dosen, dinyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik dalam pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Menurut Webster dalam Kunandar (2011 : 45) profesionalisme berasal dari kata profesi yang artinya suatu bidang pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni oleh seseorang. Profesi juga diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif. Guru dipandang sebagai seorang profesional karena memiliki pengetahuan yang memang hanya dapat dikuasai dengan pendidikan tertentu, mampu secara mandiri mengambil keputusan, dan mempunyai prestasi tertentu dalam masyarakat (Bernadib dalam Syaiful Sagala, 2013 : 10). Profesionalisme itu sendiri dalam sudut pandang Nurfuadi (2012 : 10) merupakan sikap professional yang berarti melakukan sesuatu sebagai pekerjaan pokok sebagai profesi dan bukan sebagai pengisi waktu luang atau sebagai hobi. Guru yang profesional ini yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan mutu dan kualitas dari setiap pembelajaran yang dilakukan sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

### 2.1.2 Guru Geografi

Guru memegang peran penting karena baik buruknya suatu kurikulum pada akhirnya bergantung pada aktivitas dan kreatifitas guru dalam menjabarkan dan merealisasikan kurikulum. Sehingga, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidikan, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Guru geografi adalah seorang guru lulusan S1 Pendidikan Geografi yang mengajar bidang studi Geografi pada suatu SMA yang mana bidang studi yang diajarkan oleh guru tersebut adalah bidang studi Geografi. Idealnya, pelajaran geografi di SMA hanya diajarkan oleh seorang lulusan SI Pendidikan Geografi. Namun, pada kenyataannya, kondisi di lapangan tidak selamanya sesuai harapan. Sebagai contoh, banyak guru lulusan bidang studi lain (Non S1 Pendidikan Geografi) yang kini mengajar geografi.

Sebuah konsekuensi yang logis bahwasanya apabila seseorang yang lulusan bidang ilmu tertentu, misalnya Pendidikan Geografi, akan lebih menguasai materi/pelajaran Geografi tersebut dibandingkan dengan seorang yang bukan lulusan Pendidikan Geografi, karena hal tersebut sudah menyangkut profesionalisme, dimana profesionalisme guru akan berdampak kuat terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Namun, kenyataan di lapangan adalah masih banyak guru Geografi yang bukan lulusan S1 Pendidikan Geografi. Salah satu contohnya yakni seorang guru lulusan S1 Pendidikan Sejarah yang mengajar bidang studi geografi.

Pada setiap mata pelajaran di sekolah lanjutan membutuhkan guru yang ideal. Adapun syarat untuk menjadi guru geografi yang baik tidak hanya terbatas pada pendidikan yang diikuti sebelumnya yang menghasilkan ijazah dan wewenang bagi yang bersangkutan untuk mengajar. Disamping itu masih diperlukan beberapa keistimewaan pada guru itu sendiri untuk dilatih dan dikembangkan lebih lanjut. Guru yang ideal adalah guru yang beban jumlah jam mengajar per minggu mencapai jumlah jam mengajar maksimum yaitu 24 Jam.

Standar kompetensi guru mencakup kompetensi inti guru yang dikembangkan menjadi kompetensi guru mata pelajaran geografi pada SMA/MA, SMK/MAK\* dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 tahun 2007 yaitu:

- a. Menguasai hakikat struktur keilmuan, ruang lingkup, dan objek geografi.
- b. Membedakan pendekatan-pendekatan geografi.
- c. Mengusai materi geografi secara luas dan mendalam.
- d. Menunjukkan manfaat mata pelajaran geografi.

Apabila empat hal tersebut di atas belum timbul dan dirasakan oleh guru geografi, itu masih dapat dibangkitkan, dibimbing dan disempurnakan. Caranya dengan banyak membaca buku-buku tuntunan pengajaran geografi, membentuk kelompok studi antar guru geografi, memperhatikan wilayahnya sendiri dari segi geografis dengan bantuan berbagai dinas dan jawatan setempat. Hanyalah dengan guru geografi yang ideal dapat dijamin pemberian pengajaran yang lebih kausal, artinya yang lebih berfungsi merelasikan manusia dengan lingkungan daripada yang sekedar menghafalkan data dan fakta.

### 2.1.3 Kualifikasi Pendidikan Guru

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kualifikasi adalah pendidikan khusus untuk memperoleh suatu keahlian atau keahlian yang diperlukan untuk mencapai sesuatu (menduduki jabatan dsb). Sedangkan akademik memiliki arti akademis. Jadi kualifikasi akademik adalah keahlian atau kecakapan khusus dalam bidang pendidikan baik sebagai pengajar pelajaran, administrasi pendidikan dan seterusnya yang diperoleh dari proses pendidikan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, kualifikasi akademik diartikan sebagai tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ( Pasal 28 ayat 2 ).

Menurut Suparlan (2008: 146), guru merupakan salah satu unsur masukan instrumental yang amat menentukan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, guru harus memiliki standar kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan yang memadai.

Berdasarkan pengertian guru dan kualifikasi yang telah dijabarkan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan mengenai kualifikasi guru. Kualifikasi guru adalah keahlian yang diperlukan seseorang untuk menjalankan profesi guru. Dalam penelitian ini kualifikasi guru dimaksudkan untuk guru mata pelajaran geografi SMA. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan diatur beberapa hal tentang kualifikasi akademik guru yang berbunyi:

“Pendidik pada SMA atau yang sederajat memiliki : (a) kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D – IV) atau sarjana (S1); (b) latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan (c) sertifikasi guru untuk SMA/MA ( Pasal 29 ayat 4 ).”

Pengertian dari kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang seharusnya dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa seorang guru pada jenjang pendidikan SMA, harus memiliki kualifikasi akademik guru dengan pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sesuai antara latar belakang pendidikan dengan mata pelajaran yang diampu. Sehingga guru tersebut mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan maksimal agar tercapai tujuan pembelajaran yang diharapkan.

Pendidikan adalah proses mengubah sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dari uraian tersebut penulis berpendapat bahwa pengertian latar belakang pendidikan adalah ijazah pendidikan akademik terakhir yang dimiliki seorang guru. Sehubungan dengan hal itu, tentunya dibutuhkan suatu upaya untuk memprofesionalisasi tenaga kependidikan. Menurut I Nyoman Jampel (2001:15), upaya-upaya untuk memprofesionalisasi tenaga pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Pendidikan tenaga kependidikan, harus menekankan secara seimbang wawasan akademik, kemampuan adaptasi dan generalisasi, serta jiwa pengabdian kepada

masyarakat. Untuk kepentingan ini, kurikulum pendidikan tenaga kependidikan harus mempunyai keseimbangan ketiga ranah tersebut serta diberikan porsi aplikasi seimbang pula. Jika perlu dikembangkan, sehingga tamatan lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) telah diyakini memiliki kemampuan yang memadai dalam ketiga ranah tersebut.

- b. Sistem penyinggihan (*recruitment*) dan penempatan tenaga kependidikan harus secara sungguh-sungguh didasarkan pada prinsip *the right man on the right place*.
- c. Sistem promosi dalam jabatan baik dalam jabatan structural maupun professional harus didasarkan pada profesionalitas yang ditunjukkan tenaga kependidikan. Serta menjauhkan praktek-praktek promosi dalam jabatan yang didasarkan atas kolusi dan nepotisme.

#### 2.1.4 Kompetensi Guru

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (WJS Purwadarminta), kompetensi berarti kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal. Pengertian dasar kompetensi (*competency*) yakni kemampuan atau kecakapan.

Kompetensi di definisikan dalam Surat Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002.

Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.

Secara singkat kompetensi bagi guru dapatlah disimpulkan bahwa kompetensi guru merupakan kemampuan dan kewenangan guru dalam melaksanakan profesi keguruannya. Ada sekurang-kurangnya empat kompetensi yang harus dimiliki seorang guru, yaitu:

##### 1) **Kompetensi Profesional**

Guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal atau dengan kata lain,

guru profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya, yang dimaksud dengan terdidik dan terlatih bukan hanya memperoleh pendidikan formal tetapi juga harus menguasai berbagai strategi atau teknik di dalam kegiatan belajar mengajar serta menguasai landasan-landasan kependidikan seperti yang tercantum dalam kompetensi guru yang profesional. Terdapat banyak pendapat tentang kompetensi yang seharusnya dikuasai guru sebagai suatu jabatan profesional. Ada ahli yang menyatakan ada sebelas kompetensi yang harus dikuasai guru, yaitu:

- a. Menguasai bahan ajar.
- b. Menguasai landasan-landasan kependidikan.
- c. Mampu mengelola program belajar mengajar.
- d. Mampu mengelola kelas.
- e. Mampu menggunakan media/sumber belajar lainnya.
- f. Mampu mengelola interaksi belajar mengajar.
- g. Mampu menilai prestasi peserta didik untuk kepentingan pengajaran.
- h. Mengetahui fungsi dan program pelayanan bimbingan dan penyuluhan.
- i. Mengetahui penyelenggaraan administrasi sekolah.
- j. Memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran, dan
- k. Memiliki kepribadian yang tinggi.

## 2) **Kompetensi Pedagogik**

Kemampuan pedagogik pada dasarnya adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi pedagogik merupakan salah satu jenis kompetensi yang harus dikuasai guru. Kompetensi pedagogik merupakan kompetensi khas yang membedakan guru dengan profesi lainnya. Kompetensi pedagogik diperoleh melalui upaya belajar secara terus menerus, dan sistematis, baik pada masa pra jabatan maupun selama dalam jabatan,



yang didukung oleh minat, bakat dan potensi keguruan lainnya dari masing-masing individu yang bersangkutan.

### 3) **Kompetensi Kepribadian**

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa dan menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Kepribadian yang mantap dan stabil memiliki indikator esensial, yakni bertindak sesuai dengan norma hukum, bertindak sesuai dengan norma sosial, bangga sebagai guru, dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma. Kepribadian yang dewasa memiliki indikator esensial, yakni menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru. Kepribadian yang arif memiliki indikator esensial, yakni menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. Kepribadian yang berwibawa memiliki indikator esensial, yakni memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani. Kepribadian yang berakhlak mulia dan dapat menjadi teladan memiliki indikator esensial, yakni bertindak sesuai dengan norma religius (iman, taqwa, jujur, ikhlas, suka menolong), dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik.

Didalamnya juga diharapkan tumbuhnya kemandirian guru dalam menjalankan tugas serta senantiasa terbiasa membangun etos kerja. Sehingga semua sifat ini memberikan pengaruh positif terhadap kehidupan guru dalam kesehariannya.

Seorang guru harus mempunyai kemampuan yang berkaitan dengan kemandirian dan integritas kepribadian seorang guru. Sehingga guru dituntut harus mampu membelajarkan siswanya tentang disiplin diri, belajar membaca, mencintai buku, menghargai waktu, belajar bagaimana cara belajar, mematuhi aturan atau tata tertib, dan belajar bagaimana harus berbuat. Semua itu akan berhasil jika guru juga disiplin dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

#### 4) **Kompetensi Sosial**

Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara harmonis dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Indikasinya, guru mampu berkomunikasi dan bergaul secara harmonis dengan peserta didik, sesama tenaga kependidikan, serta dengan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.

Menurut Adam (1983), menyimpulkan tiga komponen yang memungkinkan seseorang membangun dan menjalani hubungan yang positif dengan teman sebaya, yaitu pengetahuan tentang keadaan emosi yang tepat untuk situasi sosial tertentu (pengetahuan sosial), kemampuan untuk berempati dengan orang lain (empati), dan percaya pada kekuatan diri sendiri (*locus of control*). Sedangkan La Fontana dan Cillesen (2002) menuliskan bahwa kompetensi sosial dapat dilihat sebagai perilaku prososial, altruistik, dan dapat bekerja sama. Anak-anak yang sangat disukai dan yang dinilai berkompetensi sosial oleh orang tua dan guru-guru pada umumnya mampu mengatasi kemarahan dengan baik, mampu merespon secara langsung, melakukan cara-cara yang

dapat meminimalisasi konflik yang lebih jauh dan mampu mempertahankan hubungannya (Fabes dan Eisenberg dalam Papalia dkk, 2002).

Sementara itu Rydell dkk. (1997) menuliskan bahwa berdasarkan hasil berbagai penelitian sejauh ini, kompetensi sosial merupakan fenomena *unidimensional*. Hal-hal yang paling disepakati oleh para ahli psikologi sebagai aspek kompetensi sosial anak adalah perilaku prososial atau *prosocial orientation* (suka menolong, dermawan, empati) dan *initiative taking versus social withdrawal* dalam konteks interaksi sosial atau disebut juga sebagai *social initiative* (Waters dkk dalam Rydell, 1997). Aspek *prosocial orientation* terdiri dari kedermawanan (*generosity*), empati (*empathy*), memahami orang lain (*understanding of others*), penanganan konflik, (*conflict handling*), dan suka menolong (*helpfulness*). Aspek Sosial Initiative terdiri dari aktif untuk melakukan inisiatif dalam situasi interaksi sosial dan perilaku yang menarik (*withdrawal behavior*) dalam situasi tertentu (Rydell dkk, 1997).

Menurut Panduan Serтификаси Guru Tahun 2006 bahwa terdapat empat indikator untuk menilai kemampuan sosial seorang guru, yaitu :

- a. Bertindak objektif serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi.
- b. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat.
- c. Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya.
- d. Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.

### 2.1.5 Sertifikasi Guru

Sertifikasi guru merupakan pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi profesional. Oleh karena itu, proses sertifikasi dipandang sebagai bagian esensial dalam upaya memperoleh sertifikat kompetensi sesuai profesi yang dipilihnya. Menurut Kunandar dalam bukunya "*Guru Profesional*", sertifikasi guru merupakan keniscayaan masa depan untuk meningkatkan kualitas dan martabat guru, menjawab arus globalisasi dan menyasati sistem desentralisasi. Adapun manfaat dan tujuan sertifikasi bagi guru dalam bidang profesi kependidikan, yaitu:

#### 1) Manfaat Sertifikasi

- a. Melindungi profesi guru dari praktik layanan pendidik yang tidak kompeten sehingga dapat merusak citra profesi guru itu sendiri.
- b. Melindungi masyarakat dari praktek pendidikan yang tidak berkualitas dan profesional yang akan menghambat upaya peningkatan kualitas pendidik dan penyiapan sumberdaya manusia di negeri ini.
- c. Menjadi wahana penjamin bagi LPTK, yang bertugas mempersiapkan calon guru dan juga berfungsi sebagai control mutu bagi pengguna layanan pendidik.
- d. Menjaga lembaga penyelenggaraan pendidik dari keinginan internal dan eksternal yang potensial dapat menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

#### 2) Tujuan Sertifikasi

- a. Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan nasional pendidikan.
- b. Meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan.
- c. Meningkatkan martabat guru sebagai pendidik.
- d. Meningkatkan profesionalisme guru.
- e. Meningkatkan kesejahteraan guru.
- f. Meningkatkan mutu seorang guru.
- g. Melindungi profesi pendidik dan tenaga kependidikan.

- h. Melindungi masyarakat dari peraktek-peraktek yang tidak kompeten sehingga merusak citra pendidik dan tenaga kependidikan.
- i. Membantu dan melindungi lembaga penyelenggara pendidikan dengan menyediakan rambu-rambu dan instrument untuk melakukan seleksi terhadap pelamar yang kompeten.

### **2.1.6 Kebutuhan Guru**

Menurut Beatty (1994), kebutuhan guru adalah “ketidak sesuaian”, ketidak sesuaian yang dimaksud disini adalah ketidak sesuaian yang dapat diukur antar kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan pada suatu waktu tertentu dalam hal kebutuhan guru. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tentang Guru dan Dosen Bab IV pasal 24 ayat (1) yaitu: Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara baik untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal serta untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Menurut Malayu S.P Hasibuan (1996:22), untuk mencapai mutu pendidikan yang diinginkan, maka tenaga guru perlu mendapat perhatian khusus baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Mengenai kuantitas tenaga guru diperlukan perencanaan yang baik, agar tidak terjadi penumpukan tenaga guru di suatu sekolah atau di daerah tertentu tapi dipihak lain terjadi kekurangan guru. Jika hal ini terjadi maka akan merugikan dunia pendidikan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tentang guru dan dosen Bab IV Pasal 24 ayat (1), tercantum bahwa pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam

kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal serta untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang diatas, dapat dinyatakan bahwa pemenuhan akan kebutuhan guru khususnya geografi di setiap daerah merupakan kewajiban pemerintah, termasuk pula sebaran dan kualifikasi untuk menjadi seorang guru. Untuk mewujudkan hal tersebut, kerja sama yang baik antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah tentunya sangat dibutuhkan.

Dalam UU.No.14.Tahun 2005. Pasal 35 Ayat (2) dinyatakan bahwa beban kerja guru mengajar sekurang-kurangnya 24 jam per minggu atau sampai sebanyak-banyaknya 40 jam tatap muka/minggu. Hal ini untuk mengefektifkan keilmuan yang dimiliki guru untuk tugas profesionalny. Namun dalam lembaga pendidikan SMA dan atau SMP di daerah tertentu, sering terjadi kebanyakan guru bidang studi yang numpuk, sehingga jumlah jam mengajar minimalnya tidak terpenuhi, bahkan terjadi nol jam mengajar, atau sebaliknya yaitu kekurangan guru yang menjadi penyebab guru yang mengajar tidak sesuai dengan kualifikasi keahliannya.

Kebijaksanaan dalam pengadaan kebutuhan guru haruslah seimbang antara jumlah sekolah dan jumlah guru yang ada. Dengan jumlah guru yang terlalu banyak pada sebuah sekolah akan tidak efektif karena akan membuat jumlah mengajar guru yang berkurang dari jumlah yang seharusnya dibebankan oleh seorang guru.

Dalam membuat perencanaan pendidikan menurut Ballaka (1983) sebagai berikut:

“Perencanaan harus memperhatikan prioritas. Hal ini ada sehubungan dengan adanya keterbatasan-keterbatasan. Dalam hal jumlah, prioritas barang kali terletak pada jumlah guru pada bidang studi tertentu. Perencanaan harus berorientasi pada pelaksanaan. Perencanaan tidak dapat dipisahkan dari pembiayaan. Tersediannya dana merupakan faktor penentu dalam pelaksanaan rencana dan program. Perencanaan harus terdapat penyesuaian”.

Dengan perencanaan yang matang akan mempermudah dalam persebaran kebutuhan guru terhadap sekolah yang membutuhkan. Keadaan tersebut, dalam rangka untuk menjamin keberlangsungan pendidikan yang diselenggarakan, dan untuk mewujudkannya harus terjadi kerjasama yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Namun di era otonomi daerah seperti sekarang ini, nampaknya kebijakan untuk penataan sebaran guru yang tepat dengan kebutuhan sekolah semakin jauh untuk dapat diwujudkan.

Suatu akibat yang terjadi, bahwa proses pembelajaran pada materi pelajaran tertentu, sering diajarkan oleh guru lain yang tidak sesuai dengan keahlian dan kualifikasi guru tersebut. Sedangkan guru harus memiliki karakter yang mulia, untuk ditiru anak didiknya, di antaranya: Guru harus komitmen, yaitu melakukan tugas dan tanggung jawab; kompeten, yang mampu menyelenggarakan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan; konsisten, memiliki kemampuan kemampuan, sabar, ulet dan melakukan perbaikan tugasnya; sederhana, dalam mengaktualisasikan secara efektif dan efisien; dan mampu berinteraksi dan melayani kebutuhan peserta didiknya secara optimal (F.Hidayatullah, 2010: 25).

Dalam Kep. Mendiknas No.18 Tahun 2007 dinyatakan, bahwa guru yang telah lulus sertifikasi pendidikan, harus memenuhi syarat maksimal 24 jam/minggu

dalam tugas mengajarnya, untuk memperoleh tunjangan profesi sebesar satu kali gaji setiap bulannya.

Atas dasar tersebut, persebaran guru yang tidak merata antar sekolah diberbagai daerah, akan berpengaruh pada ketidaksesuaian beban tugas dan jumlah jam kerja minimal 24jam/minggu, sebagai syarat mendapatkan tunjangan profesinya. Oleh karena itu, diperlukan adanya pemetaan dan penataan tugas guru yang tersebar diberbagai sekolah dan daerah.

Untuk melihat kebutuhan guru harus diketahui terlebih dahulu komponen-komponennya, yaitu jumlah kelas, jumlah jam pelajaran per minggu, dan jumlah maksimum wajib mengajar guru per minggu . Lebih jelasnya yakni :

- a. Jumlah kelas, yaitu banyaknya kelas murid yang mengikuti pelajaran bidang studi tertentu pada suatu sekolah.
- b. Jumlah jam bidang studi per minggu, yaitu jumlah jam untuk setiap kelas pada bidang studi tertentu setiap minggu pada suatu sekolah.
- c. Jumlah jam maksimum wajib mengajar guru per minggu, maksudnya adalah jumlah jam wajib maksimum seorang guru untuk mengajar. Jumlah jam maksimum wajib mengajar seorang guru adalah 24 jam.

(sumber: Biro Perencanaan Depdikbud, 1987. *Perencanaan Akan Kebutuhan Guru*. Sekjen Depdikbud. Jakarta).

Untuk mengetahui kebutuhan guru geografi pada setiap SMA di wilayah Kabupaten Pesawaran, dilakukan analisis berdasarkan hasil perhitungan menggunakan rumus setelah memperoleh data beberapa komponen dari hasil kuesioner atau angket. Sehingga kebutuhan guru Geografi pada setiap SMA di



wilayah Kabupaten Pesawaran dapat diketahui secara jelas. Adapun rumus yang digunakan yaitu sebagai berikut:

$$KG = \frac{JK \times JBP}{JMG}$$

Keterangan:

KG = Kebutuhan Guru  
 JK = Jumlah Kelas  
 JBP = Jumlah Jam Mengajar Per Minggu  
 JMG = Jumlah Maksimal Wajib Mengajar Guru Per Minggu  
 (Biro Perencanaan Depdikbud, 1987. Perencanaan Akan Kebutuhan Guru. Sekjen Depdikbud. Jakarta).

Bagi sekolah negeri kebutuhan guru ditentukan oleh formasi guru yang ada dan ditentukan oleh ketersediaan dana (anggaran pemerintah), berbeda dengan sekolah swasta. Pada sekolah negeri jika terjadi kelebihan guru maka harus dilakukan mutasi ke daerah yang kekurangan guru, sedangkan pada sekolah swasta kebijaksanaan mengenai kebutuhan guru akan diserahkan sepenuhnya kepada pengelola sekolah tersebut.

### 2.1.7 Sebaran Guru

Menurut Zamroni, S.Si (2014: 5) bahwa terdapat empat prinsip-prinsip geografi, salah satunya yaitu prinsip distribusi atau persebaran. Prinsip distribusi atau persebaran adalah suatu gejala dan fakta yang tersebar tidak merata di permukaan bumi, yang meliputi bentang alam, tumbuhan, hewan, dan manusia.

Penelitian ini mencoba mengkaji gejala dan fakta persebaran dalam lingkup manusia dan atau keprofesian guru yang kemudian menjadi objek penelitian dalam penelitian ini, yang berikutnya disebut sebagai sebaran dan kebutuhan guru. Gejala sebaran yang dikaji dalam penelitian ini yakni pola sebaran dan kebutuhan

guru SMA di wilayah Kabupaten Pesawaran, yang mempengaruhi langsung kebutuhan akan guru di tiap-tiap sekolah tersebut. Dalam rangka peningkatan kualitas proses dan hasil pembelajaran di Kabupaten Pesawaran. Melalui data-data guru dan sekolah yang menjadi fakta penelitian dan masalah yang akan dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini.

Pemerintah telah mengatur tentang pengangkatan dan penempatan pada satuan pendidikan dalam PP 74 Tahun 2008 pasal 58 disebutkan bahwa:

- 1) Pengangkatan dan penempatan guru yang diangkat oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Departemen melakukan koordinasi perencanaan kebutuhan guru secara nasional dalam rangka pengangkatan dan penempatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Perencanaan kebutuhan guru secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan pemerataan guru antar satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah dan atau masyarakat, antarkabupaten atau antarkota, dan antarprovinsi, termasuk kebutuhan guru di daerah khusus.

Berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Bersama, penataan guru adalah proses menata ulang agar rasio, kualifikasi akademik, distribusi, dan komposisi guru sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan. Yang dimaksud komposisi guru itu sendiri adalah perbandingan jumlah guru dalam satuan pendidikan sesuai dengan rombongan belajar atau mata pelajaran yang diampu sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan. Dimana suatu satuan pendidikan harus memiliki guru kelas, guru mata pelajaran,

guru bimbingan dan konseling atau konselor sesuai dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan.

Menurut Oemar Hamalik (2002 : 12), masalah yang dihadapi di dunia pendidikan saat ini yakni:

1. Kekurangan jumlah guru dalam tiap jenjang persekolahan dan per bidang studi. Jumlah guru yang dibutuhkan tidak seimbang dengan persediaan jumlah guru dibandingkan dengan proyeksi tambahan murid.
2. Masalah mutu, bahwa kualifikasi guru yang diminta oleh SLTP/SLTA tidak cocok dengan kualifikasi yang telah tersedia dilihat dari kebutuhan bidang studi.
3. Penyebaran guru tidak seimbang dengan permintaan daerah-daerah yang tersebar luas dengan sebagian besar guru ingin bekerja di kota-kota saja.
4. Faktor waktu, bahwa terdapat *time lag* antara jangka waktu pendidikan *pre-service* dengan saat dimana para lulusan diperlukan.
5. Karena kurangnya guru, maka pada umumnya guru mengajar melebihi beban resmi, dimana akan berpengaruh pada hasil pendidikan.
6. Kenyataan yang terlihat selama ini dan masih juga menggambarkan ialah lembaga-lembaga penataran masih bermacam ragam, belum dipusatkan pada satu lembaga tertentu.

Berkaitan dengan masalah kebutuhan dan sebaran kepegawaian, dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 pasal 41 ayat 2 telah dinyatakan bahwa: “pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal.” Berdasarkan uraian tersebut, maka sangatlah jelas bahwa diperluakannya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan untuk masalah pengangkatan serta penempatan guru, terkait dengan merata atau tidaknya sebaran guru.

Sementara itu, letak atau penyebaran sekolah dalam konteks ruang perkotaan dapat diidentifikasi dengan melakukan analisis keruangan. Menurut Bintarto (1982 : 75-76), pada hakekatnya analisis keruangan adalah analisis lokasi yang menitikberatkan kepada 3 unsur geografi yaitu jarak (*distance*), kaitan (*interaction*) dan gerakan (*movement*). Salah satu model dalam analisis keruangan adalah analisis tetangga terdekat (*nearestneighbour analysis*) yang menggambarkan pola penyebaran pemukiman dalam 3 bentuk yaitu: (i) *type cluster* atau mengelompok, (ii) *type random*, dan (iii) *type regular* atau seragam.

Pemerintah sudah mengatur tentang otonomi daerah dalam Undang – Undang No. 22 Tahun 1999, Pemerintah Republik Indonesia merumuskan peraturan tentang Pemerintah Daerah dalam rangka otonomi daerah. Pasal 11 ayat (2) dari undang-undang tersebut menegaskan bahwa pekerjaan di bidang pendidikan dan kebudayaan merupakan salah satu kewajiban yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Dengan adanya perubahan pola pengaturan penyelenggaraan pendidikan dari yang sepenuhnya diatur secara sentralistik oleh Pemerintah Daerah, maka saatnya setiap daerah dapat menggali dan mengembangkan potensi dibidang pendidikan.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 disebutkan, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengelola kepegawaian di daerah. Selanjutnya pada pasal 76 dalam Undang-undang diuraikan maksud dari kewenangan yang kemudian landasan hukum ini hendaknya digunakan sebagai pijakan Pemerintah Daerah dalam menata kepegawaian di daerah sebagai berikut:

“Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pengangkutan dan pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai, serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

Berkaitan dengan masalah kebutuhan dan sebaran kepegawaian, dalam pasal 41 ayat (2) Undang-Undang republik Indonesia No. 20 tahun 2003 telah dinyatakan pula bahwa:

”Pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan di atur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal”.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah berkoordinasi dalam melakukan hak dan kewajiban untuk masalah pengangkatan serta penempatan guru, hal ini terkait dengan merata atau tidaknya persebaran guru. Sudah seharusnya seorang guru dapat menempatkan dirinya sesuai dengan tugas dan peranannya sebagai seorang guru, sehingga dengan penempatan diri yang tepat maka proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangka peningkatan dan pemerataan guru, sebagaimana menurut Amatembun (1973) sebagai berikut:

- (1) Berdasarkan kebutuhan guru bidang studi yang nyata,
- (2) Sedapat mungkin tetap mempertahankan guru yang ada dengan kualitas yang baik,
- (3) Guru yang akan dimutasikan ke tempat lain tidak menimbulkan masalah atau kesulitan di tempat yang baru.
- (4) Mutasi ke daerah terpencil sulit, oleh sebab itu perlu mendapat perhatian khusus.

Masalah yang sering muncul akibat dari otonomi daerah tersebut adalah tidak meratanya sebaran guru akibat dari kurangnya tenaga pengajar yang mau ditempatkan pada daerah-daerah terpencil. Dengan tidak meratanya sebaran guru banyak menimbulkan kesenjangan sehingga terpaksa seorang guru harus mengajar mata pelajaran yang bukan dari bidangnya. Sebaran guru yang tidak merata juga akan membuat pembelajaran yang dilaksanakan menjadi tidak ideal. Akibat dari kurangnya sebaran guru tersebut akan membuat seorang guru harus mengambil jam mengajar yang tidak sesuai dengan kapasitasnya.

## **2.2 Kerangka Pikir**

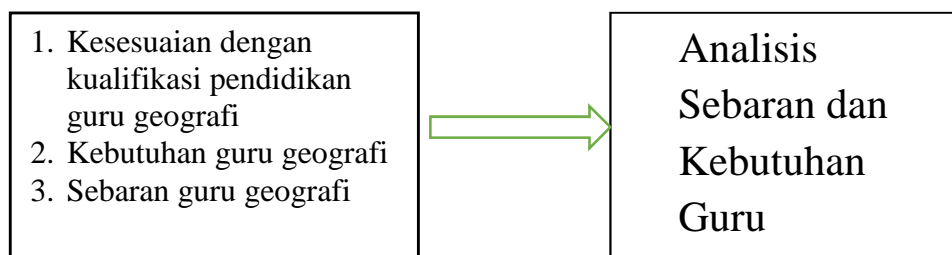
Untuk meningkatkan mutu pendidikan serta pemerataan pendidikan melalui guru yang berkualitas dan profesional, dapat terwujud secara optimal dengan adanya pemerataan sebaran guru. Dalam hal ini, pemerataan sebaran guru yang diharapkan adalah guru ditempatkan sesuai dengan kebutuhan guru geografi pada sebuah SMA dan guru profesional berdasarkan kualifikasi pendidikan, seperti guru geografi SMA diharapkan guru lulusan S1 Pendidikan Geografi. Karena ini akan mempengaruhi proses pembelajaran geografi di kelas dan kualitas siswa dalam memahami materi geografi yang disajikan guru. Kebutuhan guru geografi pada setiap SMA berbeda jumlahnya dengan jumlah jam mata pelajaran perminggu, jumlah jam wajib mengajar dan jumlah kelas. Maka sebaiknya ada perhitungan kebutuhan guru pada setiap SMA agar dapat diketahui kebutuhan gurunya sudah terpenuhi atau belum.

Dari hal tersebut maka sangat dibutuhkan suatu media sebagai informasi yang memuat tentang informasi tenaga kependidikan dan sekolah khususnya SMA

yang ada di wilayah Kabupaten Pesawaran. Salah satu cara adalah dengan membuat peta sebaran dan kebutuhan guru geografi SMA di wilayah Kabupaten Pesawaran.

Dari peta sebaran guru tersebut dapat diketahui beberapa informasi yakni pola kesesuaian kualifikasi pendidikan, selain itu juga dapat dianalisis kebutuhan guru ketenaga pengajaran kemudian sebaran guru geografi tersebut apakah sudah merata atau belum.

Untuk lebih jelasnya mengenai kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada diagram berikut:



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir Analisis Sebaran dan Kebutuhan Guru

Geografi SMA di Wilayah Kabupaten Pesawaran Tahun 2015.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif, karena peneliti ingin menggambarkan detail pola persebaran Guru Geografi di Kabupaten Pesawaran melalui teknik pemetaan. Metode deskriptif adalah “metode yang digunakan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi pada situasi sekarang, yang dilakukan dengan menempuh langkah-langkah pengumpulan, klasifikasi dan analisis pengolahan data, membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif dalam suatu deskriptif” (Moh, Ali, 1985: 131).

Berdasarkan pendapat ahli di atas, maka metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk melakukan penelitian ilmiah dengan tujuan untuk pemecahan masalah yang ada sekarang, melalui cara penggambaran keadaan secara objektif berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya dengan penafsiran data yang ada.

#### **3.2 Populasi**

Populasi penelitian yaitu keseluruhan subyek atau objek penelitian (Suharsimi Arikunto, 1998: 115). Menurut Nursid Sumaatmadja (1981 : 112) populasi



penelitian geografi itu meliputi kasus (masalah, peristiwa tertentu), individu (manusia baik sebagai perorangan maupun kelompok), dan gejala (fisis, sosial, ekonomi, budaya, politik) yang ada pada ruangan geografi tertentu. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi penelitian adalah seluruh guru geografi pada Sembilan belas SMA yang terdapat di Wilayah Kabupaten Pesawaran tahun 2015, yaitu sebanyak 27 guru. Karena jumlah populasinya tidak mencapai 100 orang dan hanya berjumlah 27 orang, maka pada penelitian ini tidak menggunakan sampel, melainkan penelitian populasi dan semua dijadikan responden.

### **3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel**

#### **3.3.1 Variabel Penelitian**

Menurut Suharsimi Arikunto (2010:161), Variabel Penelitian adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Berdasarkan pendapat tersebut, variabel dalam penelitian ini adalah Sebaran dan Kebutuhan Guru Geografi SMA di wilayah Kabupaten Pesawaran Tahun 2015.

Adapun yang menjadi indikator penelitian ini meliputi:

1. Kesesuaian guru geografi dengan kualifikasi pendidikannya disetiap SMA di wilayah Kabupaten Pesawaran Tahun 2015.
2. Jumlah guru geografi yang dibutuhkan disetiap SMA di wilayah Kabupaten Pesawaran Tahun 2015.
3. Sebaran guru geografi disetiap SMA di wilayah Kabupaten Pesawaran Tahun 2015.

### 3.3.2 Definisi Operasional Variabel

#### 1. Kualifikasi Pendidikan Guru

Maksud kualifikasi pendidikan guru dalam penelitian ini adalah kesesuaian keterangan ijazah pendidikan akademik terakhir berasal dari program studi geografi fakultas keguruan tertinggi tertentu. Adapun latar belakang yang dimaksud:

a. Sesuai apabila

- 1) Seorang guru memiliki pendidikan D4, S1 geografi;
- 2) Seorang guru yang berijazah S1 geografi dan telah disertifikasi;
- 3) Seorang guru yang berijazah non S1 geografi tetapi telah disertifikasi.

b. Tidak sesuai apabila

- 1) Seorang guru yang mengajar geografi tetapi tidak memiliki ijazah S1 geografi dan non sertifikasi geografi.

#### 2. Kebutuhan Guru Geografi

Kebutuhan guru pada penelitian ini ditentukan berdasarkan terpenuhi tidaknya kebutuhan guru geografi pada setiap SMA. Untuk kebutuhan guru geografi pada di Kabupaten Pesawaran dikatakan cukup jika hasil perhitungan yang diperoleh menggunakan rumus pada bab II sesuai dengan guru geografi yang ada pada SMA tersebut dengan beban jam mengajar memenuhi 24 jam per minggu, dan latar belakang pendidikan guru tersebut sesuai dengan bidang yang diajarkan yaitu lulusan S1 Pendidikan Jurusan Geografi dan telah bersertifikasi guru geografi. Dikatakan tidak cukup jika guru geografi yang terdapat pada SMA lebih banyak dibandingkan hasil perhitungan dan mengalami kekurangan jam mengajar karena

tidak memenuhi beban mengajar 24 jam per minggu dan latar belakang pendidikan guru tersebut tidak sesuai dengan bidang yang diajarkan yaitu bukan lulusan S1 pendidikan Jurusan Geografi dan non sertifikasi.

### **3. Sebaran Guru Geografi**

Sebaran guru yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu persebaran kebutuhan guru geografi yang harus dipenuhi dan sesuai dengan keperluan guru geografi disetiap SMA, mengacu pada standar kebutuhan guru dari data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran. Adapun sebaran guru geografi yang dimaksud:

- a. Dikatakan merata apabila, setiap sekolah SMA di Kabupaten Pesawaran memiliki guru geografi yang cukup (menyebar) dan sesuai dengan bidang keahlian profesinya atau dalam hal ini mata pelajaran geografi, sesuai dengan jumlah kebutuhan guru bidang studi pada sekolah tersebut.
- b. Dikatakan tidak merata apabila, guru geografi pada setiap sekolah SMA di Kabupaten Pesawaran tidak memiliki kesesuaian bidang keahlian profesi lulusan bidang studi geografi (mengelompok), tidak sesuai dengan jumlah kebutuhan guru bidang studi pada sekolah tersebut.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

#### **3.4.1 Dokumentasi**

Menurut Suharsimi Arikunto (2010:274), dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, *transkrip*, buku, surat kabar,

majalah, prasasti, notulen rapat *legger*, agenda dan sebagainya. Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data sekunder. Data sekunder berupa data jumlah sekolah dan alamat sekolah di Kabupaten Pesawaran yang terdapat di Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran, peta administratif Kabupaten Pesawaran dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan referensi lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Proses dokumentasi dilakukan pada waktu pengumpulan data baik penelitian pendahuluan dan penelitian hasil. Data yang dikumpulkan dari teknik dokumentasi adalah data.

### **3.4.2 Wawancara**

Menurut Suharsimi Arikunto (1998:145), wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interview*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan melalui percakapan secara langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah dan guru geografi SMA di wilayah Kabupaten Pesawaran. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara, sehingga pertanyaan yang diajukan peneliti lebih terarah dan tanpa mengurangi kebebasan dalam mengembangkan pertanyaan dengan menciptakan suasana percakapan yang sopan, terarah dan tepat sasaran sehingga wawancara dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta menghasilkan data yang akurat dan tepat.

Kegunaan teknik wawancara dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi mengenai jumlah guru geografi, jumlah kelas bidang studi geografi, jumlah lokal, jumlah jam bidang geografi per minggu, dan jumlah maksimum wajib mengajar per minggu.

### **3.4.3 Kuesioner**

Menurut Sugiono (2007:199) kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Dalam hal ini digunakan kuesioner karena merupakan teknik pengumpulan data yang efisien dan cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas serta dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos, atau internet. Kuesioner dilakukan dengan menggunakan pertanyaan yang telah disusun kemudian kuesioner ini ditujukan kepada guru yang mengajar geografi SMA. Kuesioner ini digunakan untuk memperoleh data mengenai keadaan guru yang mengajar, jumlah guru geografi, jumlah kelas bidang studi geografi, jumlah jam bidang studi geografi per minggu, dan kualifikasi latar belakang pendidikannya.

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan penyajian data tabel distribusi frekuensi dan persentase. Berdasarkan hasil data tabel distribusi frekuensi dan persentase tersebut akan digunakan sebagai dasar interpretasi dan deskripsi dalam pembuatan laporan penelitian ini.

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan cara pentahapan secara berurutan dan interaksionis dengan pendekatan deskriptif, yaitu terdiri dari tiga alur kegiatan bersamaan yaitu pengumpulan data sekaligus reduksi data seperti menghitung kebutuhan guru geografi, mengidentifikasi kesesuaian latar belakang pendidikan guru geografi, rekapitulasi mengenai keadaan guru geografi, selanjutnya

penyajian data yang dituangkan ke dalam bentuk peta dan tabel serta penarikan kesimpulan (Moleong, 1991: 190).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian tentang analisis sebaran guru dan kebutuhan guru geografi SMA di wilayah Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung tahun 2015 sebagai berikut:

- a. Teknik analisis kesesuaian kualifikasi pendidikan data menggunakan pengelompokan data tabel distribusi frekuensi data guru Geografi SMA di wilayah Kabupaten Pesawaran.
- b. Teknik analisis pengolahan data kebutuhan guru geografi SMA digunakan rumus di bawah ini:

$$KG = \frac{JK \times JBP}{JMG}$$

Keterangan :

KG : Kebutuhan Guru

JK : Jumlah Kelas

JBP : Jumlah Jam Bidang Studi PerMinggu

JMP : Jumlah Jam Maksimum Wajib Mengajar Guru per Minggu (24 jam)

Sumber: Biro Perencanaan Depdikbud, 1987. Perencanaan Akan Kebutuhan Guru. Sekjen Depdikbud. Jakarta.

- c. Mengenai sebaran guru geografi di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung tahun 2015, pengolahan analisis data menggunakan tabulasi frekuensi data dan media peta.

## V. SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dilakukan, dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Kualifikasi latar belakang pendidikan guru geografi SMA di wilayah Kabupaten Pesawaran dengan mata pelajaran geografi dapat dikatakan tidak sesuai karena masih banyak guru geografi yang latar belakang pendidikannya bukan dari geografi tetapi Matematika, Sejarah, Fisika, dan Bahasa Arab. Terdapat 5 guru yang masuk dalam kategori tidak sesuai dalam mengajar geografi.
2. Standar kebutuhan guru yang seharusnya dipenuhi di 19 SMA di wilayah Kabupaten Pesawaran yaitu 24 guru geografi dengan sebaran yang disesuaikan menurut jumlah kelas, jumlah jam mata pelajaran per minggu dan jumlah jam wajib mengajar guru per minggu. Sedangkan jumlah guru geografi yang terdapat di wilayah Kabupaten Pesawaran yaitu 27 orang guru dengan formasi kualifikasi guru campuran. 20 guru dalam kategori lulusan Pendidikan Geografi tetapi hanya 12 orang yang memenuhi kualifikasi dan 5 orang tidak dalam kategori lulusan Pendidikan Geografi.
3. Sebaran guru geografi SMA di wilayah Kabupaten Pesawaran dapat dikatakan tidak merata, karena terdapat 5 guru geografi tidak memiliki

kesesuaian bidang keahlian profesi lulusan Pendidikan Geografi, dan terdapat 2 sekolah yang tidak sesuai jumlah kebutuhan guru bidang studi pada sekolah tersebut dengan standar kebutuhan gurunya.

## **5.2 SARAN**

Sehubungan dengan pembahasan penelitian, dalam hal ini peneliti memberikan saran kepada :

- 5.2.1 Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran hendaknya melakukan kajian profesi guru disetiap SMA. Untuk mereformasi pembelajaran yang harus sesuai antara kualifikasi pendidikan guru dengan jam pelajaran yang diampu.
- 5.2.1 Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran hendaknya menempatkan guru-guru baru sesuai dengan kebutuhan guru mata pelajaran disetiap SMA.



## DAFTAR PUSTAKA

- Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jendral Departemen pendidikan Nasional.2005. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*. Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.Jakarta.
- Daldjoeno. 1987. *Geografi Baru Keruangan Dalam Teori dan Praktek*. Alumni. Bandung.
- Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung,2014. *Jumlah SMA Negeri maupun Swasta di Kabupaten Pesawaran*. Pesawaran.
- Depdikbud. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Balai Pustaka. Jakarta.
- E. Mulyasa. 2007. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- I Nyoman Jampel. 2001. *Profesionalisasi Tenaga Kependidikan Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidik di Era Otonomi Daerah*. Aneka Widya. IKIP Negeri Singaraja.
- Malayu S.P Hasibuan. 1996. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Mantra, Ida Bagoes. 2003. *Demografi Umum*. Pustaka Belajar. Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. 1991. *Metode Penelitian Kualitatif*. Rosdakarya. Bandung.
- Muhammad Ali.1988. *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*. Angkasa. Bandung.
- Nawawi, Hadari. 2003. *Metode Penelitian bidang Sosial*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Nurfuadi. 2012. *Profesionalisme Guru*. Stain Press. Purwokerto.
- Nursid Sumaatmadja. 1988. *Studi Geografi Suatu Pendekatan dan Analisis Keruangan*. Alumni. Bandung.

- Oemar Hamalik. 2001. *Proses Belajar Mengajar*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 16. Tahun 2007.
- Rahmat Kusnadi. 2013. <http://rahmatkusnadi6.blogspot.com/2010/07/peta-kontur.html>. di akses 13 Mei 2015 pada pukul 22.03 WIB. (Internet).
- R. Bintarto. 1983. *Metode Analisa Geografi*. LP3ES. Jakarta.
- Riyanto, Prilnali EP dan Hendi Indelarko. 2009. *Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Geografis*. Gava Media. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Suharsimi Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Wiji Suwarno. 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. AR-RUZZMEDIA. Yogyakarta.
- Syaiful Bahri Djamarah. 2005. *Guru dan Anak Didik dalam Interaktif Edukatif*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2005. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 Tentang Undang-Undang Guru dan Dosen*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta.
- Undang-undang Kepegawaian 1999. *Undang-Undang Kepegawaian Tahun 1999 Tentang Kepegawaian*.
- Undang-undang Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2007. Jakarta.
- Universitas Lampung. 2010. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Zamroni. *Paradigma Pendidikan Masa Depan*. 2000. BIGRAF. Jakarta.